

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN GLOBALISASI

Reni Windiani

Abstrack

The strategy of the implementation of Indonesian Foreign Policy (IFP) is influenced by not only domestic situation but also by the growth of the international political climate. The rapid change of the international political climate has to be followed and analyzed continuously in favour of our national interest. Further more, steps to response those changes have to be decided in the implementation of IFP in order to reach our national interest.

Keywords : Indonesian Foreign Policy, National Interest.

A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Kepentingan nasional dapat dicapai dalam wilayah negara itu sendiri dan dapat pula dicapai di luar wilayah negara. Dalam hal pencapaian kepentingan nasional dilakukan di luar batas wilayah negara, instrument yang digunakan ialah Politik Luar Negeri.

Politik Luar Negeri merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh perubahan – perubahan dinamis dari lingkungan regional dan internasional. Hal ini juga terlihat jelas pada implementasi Politik Luar Negeri Republik Indonesia (PLNRI) yang tampak memiliki karakteristik dan gaya berbeda – beda di tiap – tiap periode pemerintahan.

Periode Orde Lama PLNRI memiliki karakteristik berhubungan akrab dengan kubu negara – negara komunis, serta bergaya *Konfrontatif*. Periode Orde Baru PLNRI memiliki karakteristik berhubungan karib dengan kubu negara - negara Barat serta bergaya *Low Profile-Kooperatif*. Sedangkan pada periode Orde Reformasi PLNRI memiliki karakteristik berkawan dengan semua negara serta bergaya *Aktif-Diplomatis*.

Perubahan karakteristik dan gaya dalam pelaksanaan PLNRI lebih sering disoroti dari aspek situasi dan kondisi dalam negeri, pada tulisan ini perubahan karakteristik PLNRI akan disoroti dari aspek perubahan situasi dan kondisi lingkungan internasional. Secara khusus tulisan ini akan membatasi pada pelaksanaan PLNRI di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dari tahun 2004 hingga tahun 2009.

B. PEMBAHASAN

B.1. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA.

B.1.1. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan idiil PLNRI adalah dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Landasan konstitusional PLNRI adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi :

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Sedangkan alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah :

"... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...". Pasal 11 UUD 1945 (amandemen) berbunyi : "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain."

Pasal 13 UUD 1945 (amandemen) Ayat 1:

"Presiden mengangkat duta dan konsul."

Ayat 2:

"Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat 3:

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Sebagai **landasan operasional politik luar negeri Indonesia** adalah prinsip bebas aktif. Menurut Hatta, politik "Bebas" berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah "Aktif" berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. (Mohammad Hatta, 1976:17).

Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam PLNRI, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional PLNRI yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Pada masa Orde Lama landasan operasional PLNRI sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato – pidato Presiden Soekarno, antara lain Maklumat Politik Pemerintah yang dikeluarkan pada 1 November 1945, pidato Presiden Soekarno yang berjudul "Jalannya Revolusi Kita (Jarek)" pada tanggal 17 Agustus 1960, serta pernyataan Presiden Soekarno dalam "Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia", yang ditetapkan sebagai garis – garis besar PLNRI dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No. 2/Kpts/Sd/I/61 tanggal 19 Januari 1961. (Wuryandari,Ed., 2008: 28-30).

Pada masa Orde Baru, landasan operasional PLNRI semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya: Ketetapan MPRS no.XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973, Petunjuk Presiden 11 April 1973, Petunjuk bulanan Presiden sebagai ketua Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan, serta Keputusan-Keputusan Menteri Luar Negeri. Disamping itu landasan operasional PLNRI juga dituangkan dalam TAP MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu: TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 TAP MPR RI No. IV/MPR/1978; TAP MPR RI No. II/MPR/1983; TAP MPR RI No. II/MPR/1988; dan TAP MPR RI No. II/MPR/1993. (Wuryandari,Ed., 2008: 31-33).

Tumbangnya Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi, pada era ini ada dua kabinet yaitu : Pertama adalah Kabinet Gotong Royong (2001-2004) yang mengoperasionalkan PLNRI melalui: Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 yang

menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, UU no.37 tahun 1999 tentang pengaturan aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri, UU No.24 tentang Perjanjian Internasional yang menekankan pada pentingnya penciptaan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional, dan perubahan UUD 1945 pada beberapa pasal, khusus untuk hubungan luar negeri perubahan ada pada pasal 13. Kabinet kedua adalah Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Kabinet ini meletakkan landasan operasional PLNRI pada tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004 - 2009 yang isinya:

1. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. Langkah ini sejalan dengan pidato Bung Hatta pada 15 desember 1945, yang menyatakan bahwa "politik luar negeri yang dijalankan oleh negara mestilah sejalan dengan politik dalam negeri". seluruh rakyat harus berdiri dengan tegak dan rapat dibelakang pemerintah republik indonesia. sebagaimana lebih lanjut disampaikan oleh Hatta, bahwa "persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam diplomasi yang dijalankan".
2. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerja sama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai *concentric circle* utama politik luar negeri indonesia.
3. Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen terhadap perdamaian internasional relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa, sebagaimana dituangkan dalam alinea IV pembukaan undang-undang dasar 1945. <http://masniam.wordpress.com/2009/04/02/landasan-politik-luar-negeri-indonesia/> (diakses Senin 3 Januari 2011 jam 03.00 WIB)

B.1.2. Kepentingan Nasional Indonesia

Berubahnya landasan operasional PLNRI sebagaimana tersebut di atas, merupakan adaptasi dari berubahnya lingkungan domestik, regional dan internasional, yang kesemuanya ditujukan untuk terwujudnya kepentingan nasional. Ada beberapa definisi kepentingan nasional yang dikemukakan oleh para pakar hubungan internasional H.J. Morgenthau misalnya mempersamakan kepentingan nasional dengan *power* yang ingin dicapai suatu negara dalam hubungan internasional, Joseph Frankel dan Nicholas Spykman memiliki pandangan serupa namun dengan sedikit perbedaan dengan Morgenthau yaitu bahwa kepentingan nasional tidak hanya unsur *power* tetapi juga mencakup pula kepentingan moral,

religi, kebudayaan, dan sebagainya meskipun unsur *power* yang cukup tetap diperlukan guna mencapainya. (Bakry, 1999: 61).

Ada beberapa jenis kepentingan nasional, Donald E. Nuechterlin dalam (Bakry, 1999:62) menyebutkan sedikitnya ada 4(empat) jenis kepentingan nasional yaitu :

1. Kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain;
2. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;
3. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya;
4. Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Selanjutnya mari kita lihat jenis kepentingan nasional yang muncul di masing – masing orde pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Lama, jenis kepentingan nasional yang muncul lebih pada kepentingan akan pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi dalam negeri yang baru saja merdeka sehingga operasionalisasi PLNRI lebih ditekankan pada masalah pengakuan kedaulatan dan penuntasan dekolonisasi. Jenis kepentingan nasional yang kemudian muncul pada era Orde Baru berbeda dengan jenis kepentingan nasional era Orde Lama. Orde Baru muncul ditengah kesulitan ekonomi warisan Orde Lama, oleh karena itu prioritas utama dari PLNRI era ini adalah kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain. Meskipun tidak sama persis, kemunculan Orde Reformasi juga mewarisi kondisi ekonomi yang buruk akibat krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998. Hal ini menempatkan kembali jenis kepentingan ekonomi sebagai salah satu prioritas PLNRI Orde Reformasi. Disebutkan sebagai salah satu prioritas karena ada prioritas lainnya yaitu pemulihan citra Indonesia dimata internasional.

Selanjutnya sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tulisan ini akan membahas mengenai dampak perubahan lingkungan internasional terhadap operasionalisasi prinsip bebas aktif pada era kepemimpinan SBY (2004 – 2009).

B.2. GLOBALISASI DALAM TATA HUBUNGAN INTERNASIONAL.

Situasi dan kondisi lingkungan internasional sejak tahun 1990-an menampilkan wajah yang sangat berbeda dengan situasi dan kondisi lingkungan internasional sepuluh tahun pertama abad kedua puluh. Pada era 1990-an arena politik internasional penuh diwarnai dengan perubahan – perubahan baik dalam kompleksitas permasalahan, pelaku hubungan internasional, serta dalam konteks hubungan antar negara. Berakhirnya Perang Dingin (*Ideological War*) merubah tata pola hubungan antar negara. Hubungan antar negara tidak lagi terpolarisari menjadi dua kubu yaitu kubu komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan kubu non-komunis di bawah pimpinan Amerika Serikat. Idiologi sudah tidak lagi menjadi tolak ukur dalam hubungan antar negara. Menurunnya peran idiologi dalam percaturan politik antar negara mengantarkan pada era pola hubungan internasional yang lebih mengedepankan kerja sama yang membawa negara – negara pada kondisi saling ketergantungan yang semakin meningkat.

Seiring berlalunya era Perang Dingin, terjadi revolusi elektronik yang memunculkan Globalisasi, globalisasi merubah aktor/pelaku dalam tata hubungan internasional dan mengakibatkan semakin kompleksnya hubungan antar negara. Globalisasi sendiri ada yang memaknai secara positif dan ada pula yang memaknai secara negatif, secara positif globalisasi dimaknai sebagai proses yang akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggungjawab, sedangkan secara negatif globalisasi dipandang sebagai bentuk baru dari kolonialisme dari negara maju yang berusaha memaksakan sejumlah bentuk budaya dan konsumsi. Pendapat yang dikemukakan oleh Jan Aart Scholte dalam (Hermawan.ed.:2007:131-132) mengenai globalisasi sebagaimana disebutkan di bawah ini, menggambarkan secara jelas dua pendapat tersebut yaitu bahwa globalisasi bisa bermakna sebagai : Internasionalisasi yaitu meningkatnya intensitas interaksi lintas batas dan saling ketergantungan antar negara; Liberalisasi yaitu proses untuk memindahkan larangan-larangan yang dibuat oleh negara dalam rangka membentuk ekonomi dunia yang lebih terintegrasi; Universalisasi yaitu menyebarnya berbagai macam obyek dan pengalaman dari masyarakat di seluruh dunia; dan Westernisasi yaitu kritik terhadap proses yang sedang berjalan sebagai proses peniruan budaya Barat atau bahkan proses memaksakan sistem budaya, sistem politik dan sistem ekonomi negara-negara Barat dalam panggung dunia. Terlepas dari pemaknaan negatif dan positif dari Globalisasi, setidaknya terdapat 4(empat) ciri dasar dari konsep globalisasi yang mesti kita ketahui yaitu:

1. Meluasnya hubungan sosial (*Stretched social relations*) : hal ini mengacu pada saling keterhubungan antara jaringan sosial-budaya, ekonomi dan politik di masyarakat yang melintasi batas negara bangsa;
2. Meningkatnya intensitas komunikasi (*intensification of flows*) : berkaitan dengan makin meningkatnya intensitas hubungan antar aktor dengan munculnya perkembangan ilmu dan teknologi;
3. Meningkatnya interpenetrasi (*increasing interpenetration*) : interpenetrasi yang terjadi hampir disegala bidang mengakibatkan budaya dan masyarakat yang berada di wilayah berbeda akan saling berhadapan pada level lokal dan internasional;
4. Munculnya infrastruktur global (*global infrastructure*) : pengaturan institusional yang bersifat formal dan informal yang diperlukan agar jaringan global bekerja. (Hermawan.ed.:2007:132-133) .

Jackson dan Sorensen dalam (Hermawan.ed.:2007:134-135) menyebutkan beberapa tantangan yang muncul di era globalisasi sebagai berikut :

1. Kekuatan pasar global sangat mudah melakukan penetrasi terhadap suatu negara dan memberikan efek besar pada ekonomi nasional negara tersebut. Selain yang berhubungan dengan ekonmi, kekuatan pasar global meliputi juga, isu-isu global lain seperti masalah lingkungan hidup, sistem komunikasi global, perdagangan senjata dan narkoba, serta kejahatan transnasional.
2. Perkembangan norma internasional seperti hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan (*humanitarian law*), memberikan tantangan besar terhadap prinsip non-intervensi yg melekat pada konsep kedaulatan.
3. Kontrol terhadap ketertiban dan keamanan dalam hal ini negara tidak lagi memiliki kontrol mutlak terhadap keamanan negara dan warganegaranya.

Tantangan - tantangan yang muncul akibat globalisasi tersebut membawa dampak adanya perubahan politik sebagai berikut :

1. Rekonstruksi negara yaitu bahwa negara kehilangan kedaulatannya dalam pengertian kedaulatan mutlak dan absolut sebagaimana dimaksud dalam *Westphalia Treaty*. Prinsip komprehensivitas, mutlak, absolut dan eksklusif sulit untuk dipertahankan. Perkembangan dan trend globalisasi menunjukkan munculnya sebuah sistem baru yg disebut dengan *Post-Westphalia* atau *Post Sovereign State*. Pada *Post Westphalian System*, negara harus juga melayani warganegaranya baik pada level domestik maupun pada level supra-regional. Perlindungan negara kepada warganegaranya harus bersifat lintas batas karena banyak warga negara yang bekerja di luar negeri tetapi bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi negaranya. Dalam mencapai kepentingan nasionalnya negara cenderung mengabaikan cara-cara militer, mengedepankan kerjasama, kompromi, tawar-menawar dan persaingan sehat. Pada sistem ini terjadi kecenderungan menggunakan cara multilateralisme daripada cara bilateral.
2. Makin banyaknya lapisan dalam pemerintahan publik, yang memunculkan makin banyak aktor-aktor dalam pemerintahan. Agen-agen pemerintah membentuk divisi/biro-biro luar negeri, dan merasa mempunyai hak untuk berhubungan dengan aktor internasional lain tanpa ijin mutlak dari pemerintah pusat.
3. Privatisasi pemerintahan, nampak dalam kaitannya dengan implementasi dari kebijakan yang menunjukkan terjadinya kecenderungan akan meningkatnya peran dari biro-biro tidak resmi/di luar struktur pemerintahan. Struktur dalam era globalisasi telah menguatkan peran dari agen-agen seperti kelompok masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah untuk menjadi *partner* pemerintah dalam menjalankan kebijakan terutama yang menyangkut sektor kesejahteraan masyarakat. Dalam perumusan kebijakan juga melibatkan aktivis NGOs. (Hermawan.ed.:2007:136-138).

Tantangan dan dampak yang muncul dari globalisasi tersebut di atas, yang telah membawa perubahan – perubahan baik dibidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya pada pola hubungan antar negara, memaksa negara – negara di dunia untuk memiliki langkah – langkah tersendiri guna merespon dan beradaptasi dengan globalisasi, demikian pula dengan Indonesia.

B.3. RESPON POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP GLOBALISASI.

B.3.1. DIPLOMASI *SOFT POWER*.

Reformasi 1998 cukup banyak menyita waktu tiga presiden Indonesia yaitu Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati dengan konsolidasi kondisi dalam negeri, sehingga porsi perhatian terhadap politik luar negeri berkurang. Hal ini membawa dampak pada menurunnya peran aktif Indonesia di pentas panggung internasional. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang muncul sesudah pemerintahan Megawati, memiliki modal besar dalam penerapan kebijakan luar negerinya yaitu : kondisi politik dan ekonomi dalam negeri yang sudah cukup stabil, serta dukungan kuat atas pemerintahan yang terbentuk secara demokratis. Modal ini mendorong Indonesia di bawah SBY untuk aktif kembali di pentas internasional.

Optimalisasi Diplomasi merupakan prioritas dalam pelaksanaan PLNRI era SBY. Secara sederhana, diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara. Istilah ini biasanya merujuk pada diplomasi internasional, dimana hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional terkait isu-isu perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi dan budaya. Begitu pula perjanjian internasional yang biasanya dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disetujui oleh politisi nasional dalam negeri. Encarta Microsoft Student 2008 mendefinisikan kata diplomasi sebagai manajemen komunikasi dan hubungan antar bangsa oleh anggota dan segenap aparatur pemerintahan yang terlibat (*the management of communication and relationships between nations by members and employees of each nation's government*). Sedangkan Advanced Oxford Dictionary 2003 mengartikan kata 'diplomacy' sebagai aktifitas mengelola hubungan antar negara – negara yang berbeda (*the activity of managing relations between different countries*). Lebih jauh lagi, dari sudut pandang sosial informal, diplomasi dapat dikatakan sebagai tenaga kerja dari kebijaksanaan strategis agar memperoleh keuntungan atau untuk saling menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dapat diterima oleh dua atau banyak pihak. Hal ini dilakukan dengan cara halus, sopan, serta tanpa sikap konfrontatif (<http://interdisciplinary.wordpress.com/2009/04/03/definisi-diplomasi/> diakses pada 27 Desember 2010 jam 11.30 WIB).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa diplomasi merupakan kegiatan tawar menawar antara dua negara atau lebih guna mencapai kepentingan nasional masing – masing. Definisi diplomasi tersebut di atas lebih mengarah pada konsep diplomasi jalur tunggal (*monotrack diplomacy*) dimana aktor diplomasi didominasi oleh kalangan pimpinan negara dan pejabat diplomatik.

Seiring berjalannya waktu konsep diplomasi ini berkembang, sekarang ini muncul istilah *Multitrack Diplomacy*. Diamond dan Mc. Donald dalam (Pramudianto, 2008:203) mendefinisikan *Multytrac Diplomacy* sebagai : " *A conceptual way to view the process of international peacemaking in the United States as a whole elephant – that is, as a living system*". Secara sederhana dalam bahasa Indonesia *Multytrac Diplomacy* dapat dikatakan sebagai Diplomasi Berbagai Jalur atau Diplomasi Multijalur. Diplomasi Multijalur ini terdiri dari 9 jalur yaitu : jalur 1 Pemerintah; jalur 2 NGO dan Profesional; jalur 3 Bisnis atau Perdagangan; jalur 4 Perorangan atau Individu; jalur 5 Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan; jalur 6 Kegiatan melalui Advokasi; jalur 7 Agama; jalur 8 Dana; dan jalur 9 Komunikasi dan Media. (Pramudianto, 2008:203-204).

PLNRI pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pada penggunaan diplomasi Multijalur dengan mengedepankan konsep diplomasi *Soft Power*. Konsep diplomasi *Soft Power* ini pertama kali dikemukakan oleh SBY pada tahun 2005 dalam pidatonya di AS, dimana SBY menyatakan agar AS lebih mengandalkan *soft power* ketimbang *hard power*. Sejak saat itu konsep diplomasi *Soft Power* terus bergulir dan banyak dibahas utamanya dikalangan *policy making circle*". Filosofi presiden SBY adalah, kalau kita menggunakan *hard power* orang akan lebih melawan kita, tetapi kalau kita menggunakan *soft power*, yaitu persuasif, pendekatan budaya, psikologis dan lain sebagainya, orang akan lebih mudah menerima kita. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/46-september-2008/331-indonesia-semakin-outward-looking.html> (diakses pada 27 desember 2010 jam 10.14.WIB).

Konsep Soft Power juga dilontarkan SBY dalam Asia Europe Meeting (ASEM) di Beijing di bulan Agustus 2010, dimana SBY menyampaikan kritiknya terhadap penggunaan "hard power". "Saya menyampaikan kritik di depan para pemimpin bahwa masih banyak pemikiran yang menggunakan hard power." Abad 20, adalah abad yang penuh hard power yang ditandai dengan dua perang dunia dan konflik. "Saya harap abad ini bisa menjadi abad soft power," Indonesia, konsisten menjalankan diplomasi soft power. "<http://alutsista.blogspot.com/2008/10/soft-power-kembalikan-indonesia-ke.html> (diakses 27 desember 2010 jam 10.55).

Adapun konsep *Soft Power* itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye, Jr dalam artikelnya yang muncul pada jurnal *Foreign Policy* pada tahun 1990-an. Nye menyebutkan bahwa kekuasaan (*power*) pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *hard power* dan *soft power*. *Hard power* adalah kontrol atas pikiran dan tingkah laku seseorang didasarkan atas adanya mekanisme hukuman dan penghargaan. Sementara *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara membuat pihak lain tertarik sehingga keinginan pihak lain sejalan dengan keinginan kita tanpa melalui pemaksaan atau iming-iming imbalan. Nye mengungkapkan bahwa *soft power* suatu negara terdapat pada tiga sumber kekuatan yang tidak dapat dihitung (*intangible power resources*) yaitu kebudayaan, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negerinya. <http://rizahanafi.multiply.com/journal/item/4> (diakses pada 7 Januari 2010 jam 12.25. WIB).

Apabila kita merujuk pada konsep *Soft Power* sebagaimana dikemukakan oleh Nye, kebijakan PLNRI SBY yang mengedepankan diplomasi *Soft Power* menurut penulis sudah tepat dan realistis. Mengapa demikian? Mari kita kupas satu persatu tiga sumber kekuatan yang tidak dapat dihitung (*intangible power resources*) sebagaimana dikemukakan oleh Nye, yang dimiliki oleh Indonesia :

1. Kebudayaan : Indonesia adalah negara yang kaya baik berupa kekayaan sumber alam maupun kekayaan sumber daya sosial. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa di Indonesia ada sekitar 300 suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda, oleh karenanya Indonesia disebut sebagai negara multikultur. Untuk kebudayaan ini Indonesia sering mengirim misi – misi kebudayaan ke negara- negara lain, dalam bentuk pentas tari, nyanyi, peragaan busana daerah asli Indonesia, dan lain-lain. Indonesia juga telah beberapa kali memprakarsai dialog antar agama di forum internasional,
2. Nilai- nilai Politik : Indonesia setelah reformasi memiliki nilai-nilai politik positif yang diakui oleh dunia luar yaitu demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga telah membuktikan bahwa Islam , demokrasi, dan modernisasi, dapat berjalan bersamaan. Indonesia juga telah sukses mempromosikan demokrasi melalui Bali Democracy Forum.
3. Kebijakan Luar Negeri: Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini Indonesia tetap konsisten menjalankan kebijakan luar negerinya dengan prinsip Bebas-Aktif. Prinsip Bebas-Aktif ini memiliki citra yang positif karena mengedepankan independensi, berkawan dengan semua negara tanpa melihat ideologi, serta selalu berusaha untuk aktif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di tata hubungan internasional.

Selain tiga sumber kekuatan Soft Power tersebut di atas, Indonesia juga memiliki kekuatan lain yang dapat digunakan sebagai *bargaining* dalam tata hubungan internasional yaitu hutan yang luas. Pada tahun 1972 di Stockholm Swedia diadakan konferensi Internasional Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mengenai *Human Environment*, konferensi ini membangkitkan kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan umat manusia. Sejak saat ini pula isu mengenai lingkungan hidup menjadi salah satu agenda penting di forum regional dan multilateral.

Dalam menanggapi isu lingkungan hidup yang merupakan juga dampak globalisasi, Indonesia memegang peranan yang penting karena Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia, bahkan saat ini dipandang sebagai *environmental super power*, karena memiliki hutan yang sedemikian besar. Masalah perubahan iklim tidak akan selesai dan tidak akan bisa ditangani kecuali kalau hutan-hutan dijaga dan dilestarikan, terutama hutan-hutan di Indonesia, sehingga posisi Indonesia semakin dipandang penting.

Indonesia menjadi sorotan dunia. Hal itu berkaitan dengan dilangsungkannya Konferensi tentang Perubahan Iklim dan Pemanasan Global (*Climate Change & Global Warming*), di Bali akhir tahun 2010. Forum tersebut dihadiri oleh para pemimpin dari 180 negara di dunia dan mengeluarkan resolusi penting, pasca Protokol Kyoto, 1997. Presiden SBY sendiri dalam sambutannya di depan forum Tingkat Tinggi PBB mengenai *Climate Change* bersikap pragmatis mengenai perlunya menghentikan *global warming*. Menurut Presiden, Indonesia tak perlu penjelasan lebih panjang lagi soal dampak *global warming* dan *climate change*, karena Indonesia sudah mengalami, menjadi korban dan menderita kerugian.

Agar posisi tawar Indonesia dan negara-negara yang memiliki hutan (*Tropical Rainforest Countries*) diperhitungkan, SBY menggagas sebuah inisiatif berupa *Forestry Eight (F-8)*. Terbukti, dukungan terus mengalir atas inisiatif ini. Tiga negara lainnya melengkapi F-8 menjadi 11 negara, termasuk Brasil sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia. Selain Brasil dan Indonesia, F-8 terdiri dari Kamerun, Kolombia, Kongo, Kostarika, Gabon, Malaysia, Papua Nugini, dan Peru. Tuntutan Indonesia, mewakili F-8 yang disampaikan pada acara *High-Level Meeting on Climate Change*, adalah perlunya negara maju melakukan transfer teknologi dan memberi insentif kepada negara-negara berkembang pemilik hutan hujan tropis. <http://zaenalbudiyono.blogspot.com/2007/09/era-emas-diplomasi-indonesia.html> (diakses Selasa 4 Januari 2011 jam 17.20 WIB).

Diplomasi *Soft Power* era SBY telah menaikkan kembali citra Indonesia di mata dunia sebagaimana dikemukakan oleh SBY pada orasi Kebudayaan Nasional dalam Dies Natalis ke-51 Universitas Diponegoro Semarang sebagai berikut : "Buah *soft power*, Indonesia akhir-akhir ini kembali ada di pentas terhormat di internasional,...kita belasan tahun diembargo senjata kini usai tanpa perlu merengek, kita hadapi masalah Timor Leste. sekarang bersahabat," <http://alutsista.blogspot.com/2008/10/soft-power-kembalikan-indonesia-ke.html> (diakses pada 27 desember 2010 jam 11.20.WIB).

Keberhasilan lain yang telah dicapai ialah Indonesia sukses menyelenggarakan konferensi perubahan iklim di Bali, yang merupakan konferensi internasional PBB yang terbesar dan juga konferensi terbesar yang pernah diadakan di Indonesia, dan nilai politisnya sangat penting. Presiden SBY juga telah diundang untuk pertama kalinya hadir dalam KTT G-8 + 8, leverage summit, dimana SBY